



Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo (empat dari kiri) berfoto bersama dengan pemohon PBG dalam Bazar Perizinan dan Unit Reaksi Cepat Konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kompleks Balai Kota Jogja, Selasa (2/6).

› BAZAR PERIZINAN

Pemkot Siap Tuntaskan 900 Antrean PBG

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menargetkan penyelesaian sekitar 900 berkas permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hingga kini masih mengantre. Pemkot menargetkan ratusan berkas permohonan tersebut bisa diselesaikan tahun ini. Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, mengatakan sebagian besar keterlambatan penerbitan PBG disebabkan oleh dokumen administrasi yang belum lengkap dari pemohon. Selain itu, sebagian berkas permohonan PBG masih berada di sejumlah instansi terkait antara lain Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kota Jogja, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Menurut Hasto, salah satu penyebab ratusan permohonan perizinan tersebut belum keluar karena proses konsultasi teknis dengan tim ahli bangunan gedung di DPUPKP Kota Jogja belum dapat mengakomodasi ratusan

permohonan tersebut dalam waktu singkat. "Di DPUPKP Kota Jogja ada proses konsultasi teknis bersama tim ahli bangunan gedung. Itu yang membuat lama. Namun, prosesnya juga membutuhkan respons cepat dari pemohon ketika ada dokumen yang harus dilengkapi," ujarnya dalam Bazar Perizinan dan Unit Reaksi Cepat Konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kompleks Balai Kota Jogja, Selasa (2/6).

Untuk mengurai antrean, Pemkot Jogja mengklasifikasi berkas menggunakan indikator warna merah, kuning, dan hijau. Indikator merah diberikan untuk permohonan PBG yang sulit diselesaikan, kuning untuk permohonan PBG yang seharusnya sudah dapat diselesaikan, dan hijau untuk kategori permohonan PBG yang seharusnya sudah keluar izin tapi belum keluar izinya.

Untuk kategori permohonan PBG dengan indikator merah, Pemkot Jogja akan melakukan penyaringan untuk menghapus data yang terindikasi ganda atau double register. "Kami memilah yang sudah merah betul, dalam

arti tidak bisa dilayani, seperti ada yang sudah mengubah usahanya. Ada yang izinya diulang-ulang, ada yang satu usaha pemohonannya beberapa kali [dibel pencatatan] karena tidak dapat," katanya.

Menurut Hasto, ada ratusan berkas lainnya yang sebenarnya telah selesai secara substansi, namun masih menunggu verifikasi lapangan oleh tim penilik. "Di 2026 ini saya menargetkan menyelesaikan 900 [permohonan perizinan PBG], yang tidak jadi mengajukan juga ada," katanya.

Kepala DPMPTSP Kota Jogja, Budi Santosa, berharap masyarakat dapat memanfaatkan bazar konsultasi untuk memperoleh pendampingan langsung dari OPD teknis sehingga hambatan dalam proses perizinan dapat segera teratasi. "Harapannya masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan ini sehingga hambatan perizinan dapat diselesaikan bersama-sama, sekaligus menjadi edukasi agar kebijakan tata pemerintahan ini dipahami secara lebih baik oleh publik," ujarnya. (Stefani Yulindriani/*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005